

## PENGARUH KETERTINGGALAN AKSES INFORMASI TERHADAP PEMBANGUNAN DI DAERAH PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Yohanes Arman<sup>1</sup>, Fransiska Nyoman Supadi<sup>2</sup>, Mario Pietro Kurniawan Geong<sup>3</sup>, Hanif Al Faiq Pramana<sup>4</sup>, Patrick Aleksandro Reinaldo Yazakur<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email : [nanaarman54@gmail.com](mailto:nanaarman54@gmail.com), [supadinona@gmail.com](mailto:supadinona@gmail.com), [mariogeong0@gmail.com](mailto:mariogeong0@gmail.com), [hanifpramana09@gmail.com](mailto:hanifpramana09@gmail.com), [yazakurpatrick@gmail.com](mailto:yazakurpatrick@gmail.com)

### ABSTRACT

This study investigates the impact of limited information access on development in border regions between Indonesia and Malaysia. Employing a qualitative research method with a literature review approach, the study analyzes the correlation between information access and various development indicators. Findings reveal a strong negative correlation between limited information access and key development indicators, including the Human Development Index (HDI), economic development, community participation, human resource quality, and disaster preparedness. The limited access creates a cycle of poverty and backwardness, exacerbated by factors such as poverty, inequality, weak governance, and geographical isolation. The study emphasizes the crucial need for comprehensive strategies to improve information access and digital literacy to foster sustainable and inclusive development in these border regions.

**Keywords:** Information Access, Border Region Development, Indonesia-Malaysia Border, Human Development Index (HDI), Digital Literacy, Sustainable Development

### ABSTRAK

Studi ini menyelidiki dampak keterbatasan akses informasi terhadap pembangunan di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, studi ini menganalisis korelasi antara akses informasi dan berbagai indikator pembangunan. Temuan menunjukkan korelasi negatif yang kuat antara keterbatasan akses informasi dan indikator pembangunan utama, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan ekonomi, partisipasi masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan kesiapsiagaan bencana. Keterbatasan akses menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan, diperparah oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, lemahnya tata kelola pemerintahan, dan isolasi geografis. Studi ini menekankan pentingnya strategi komprehensif untuk meningkatkan akses informasi dan literasi digital guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di daerah perbatasan ini.

**Kata Kunci:** Akses Informasi, Pembangunan Daerah Perbatasan, Perbatasan Indonesia-Malaysia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Literasi Digital, Pembangunan Berkelanjutan.

## PENDAHULUAN

Keterbatasan akses informasi di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan di wilayah tersebut. Kurangnya akses terhadap informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu menghambat berbagai aspek pembangunan, dari ekonomi hingga sosial budaya. Kondisi ini menciptakan kesenjangan informasi yang perlu segera diatasi. Salah satu dampak utama adalah hambatan dalam pengembangan ekonomi. Kurangnya informasi mengenai peluang pasar, teknologi baru, dan program pemerintah dapat membatasi

kemampuan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup. Petani, misalnya, mungkin tidak mengetahui harga pasar terkini atau teknologi pertanian modern, sehingga produktivitas mereka rendah. Informasi pasar yang terbatas menyebabkan kerugian ekonomi. Masalah batas wilayah negara bukan menyangkut ancaman di luar, tetapi juga terkait dengan masalah kedaulatan wilayah dan hak setiap warga negara untuk mengeksplorasi kekayaan alamnya. Karena sumber kekayaan yang makin terbatas sedangkan jumlah penduduk yang makin besar, maka perbatasan wilayah menjadi sensitif bagi timbulnya perselisihan (despute) dan konflik.<sup>1</sup> Keterbatasan akses informasi juga berdampak pada kualitas pendidikan. Kurangnya akses terhadap informasi pendidikan, seperti kurikulum terbaru, metode pembelajaran inovatif, dan sumber belajar online, dapat menurunkan kualitas pendidikan di daerah perbatasan. Guru dan siswa mungkin kesulitan mendapatkan materi pembelajaran yang dibutuhkan, mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang rendah berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Kesehatan masyarakat juga terpengaruh. Kurangnya akses terhadap informasi kesehatan, seperti informasi tentang penyakit menular, pencegahan penyakit, dan layanan kesehatan yang tersedia, dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Informasi kesehatan yang terbatas meningkatkan risiko kesehatan.

Keterbatasan akses informasi juga menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kurangnya informasi mengenai program pemerintah, regulasi, dan proses pengambilan keputusan dapat menyebabkan masyarakat merasa terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam pembangunan daerah mereka. Partisipasi masyarakat yang rendah menghambat pembangunan. Pengembangan infrastruktur juga terhambat. Kurangnya informasi mengenai teknologi konstruksi, standar pembangunan, dan pendanaan dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur yang tidak efisien dan berkualitas rendah. Informasi yang tidak memadai menyebabkan infrastruktur yang buruk. Ketahanan pangan juga terancam. Kurangnya akses informasi mengenai teknologi pertanian, pengolahan pasca panen, dan pasar dapat menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan kerawanan pangan. Informasi pertanian yang terbatas menyebabkan kerawanan pangan. Keterbatasan akses informasi di daerah perbatasan Indonesia-

---

<sup>1</sup> Maria Viviana Ero Payon, Maria Fatima Kartika Mao Foju, Yohanes Arman, *Dampak Perubahan Titik Batas Di Pulau Sebatik Perbatasan Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Prinsip Uti Prossidentis*, Student Scientific Creativity Journal Vol. 1, No.5 September 2023, Hal 3.

Malaysia memiliki dampak multidimensional terhadap pembangunan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya peningkatan akses informasi melalui berbagai cara, seperti peningkatan infrastruktur telekomunikasi, pelatihan bagi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi, dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh masyarakat. Peningkatan akses informasi merupakan kunci pembangunan. (Purnamasari dkk. (2016) ).<sup>2</sup>

Kesenjangan akses informasi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga menciptakan kerentanan sosial politik. Kurangnya informasi mengenai kebijakan pemerintah, hak-hak warga negara, dan proses demokrasi dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan potensi konflik sosial. Informasi yang minim memicu ketidakpercayaan. Kurangnya akses informasi juga berdampak pada pelestarian lingkungan. Masyarakat yang kurang informasi mengenai praktik pengelolaan lingkungan berkelanjutan cenderung melakukan aktivitas yang merusak lingkungan. Kurangnya kesadaran lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan. Informasi tentang konservasi sangat penting. Selain itu, keterbatasan akses informasi juga mempersulit upaya pemberdayaan perempuan. Kurangnya informasi mengenai hak-hak perempuan, kesempatan pendidikan dan ekonomi, serta layanan kesehatan reproduksi dapat membatasi akses perempuan terhadap peluang dan meningkatkan kesenjangan gender. Informasi pemberdayaan perempuan sangat penting. Integrasi regional juga terhambat. Kurangnya informasi mengenai peluang kerja sama ekonomi, budaya, dan sosial antara Indonesia dan Malaysia dapat membatasi potensi sinergi dan pembangunan bersama di wilayah perbatasan. Kerja sama regional membutuhkan informasi yang memadai.

Perkembangan UMKM juga terhambat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah perbatasan seringkali kekurangan informasi mengenai akses pembiayaan, manajemen bisnis, dan pemasaran produk. Hal ini membatasi pertumbuhan dan daya saing UMKM. Informasi untuk UMKM sangat diperlukan. Keterbatasan akses informasi juga menyebabkan kesulitan dalam penanggulangan bencana. Kurangnya akses terhadap informasi peringatan dini bencana, evakuasi, dan bantuan dapat meningkatkan risiko kerugian jiwa dan harta benda. Informasi bencana sangat

---

<sup>2</sup> Purnamasari, W., Kara, M. H., Sabri, M., Amiruddin, A. R., & K, T. (2016). Perkembangan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara Indonesia Malaysia di Sambas. *Jurnal Diskursus Islam*, 4(2), 217–247.

penting untuk keselamatan. Pengembangan pariwisata juga terhambat. Kurangnya informasi mengenai potensi wisata, fasilitas, dan aksesibilitas dapat mengurangi daya tarik daerah perbatasan bagi wisatawan. Informasi pariwisata menarik wisatawan. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses informasi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia sangat penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pihak swasta perlu bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses, serta pelatihan bagi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kerja sama yang erat sangat penting untuk meningkatkan akses informasi.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Teori Kesenjangan Informasi (Information Gap Theory)

Teori Kesenjangan Informasi (Information Gap Theory) menjelaskan bagaimana akses yang tidak merata terhadap informasi dapat memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. Teori ini berargumen bahwa individu dan kelompok dengan akses lebih banyak terhadap informasi akan memiliki keuntungan yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan, sementara mereka yang aksesnya terbatas akan semakin tertinggal. Kesenjangan ini menciptakan siklus yang memperkuat ketidaksetaraan. Salah satu aspek kunci dari Teori Kesenjangan Informasi adalah perbedaan kemampuan individu dalam memperoleh dan memproses informasi. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi, keterampilan literasi digital yang lebih baik, dan akses terhadap teknologi informasi yang lebih canggih akan lebih mampu memperoleh dan memanfaatkan informasi. Kemampuan ini menciptakan keunggulan kompetitif.<sup>3</sup> (Yonatan, D., & Tanggur, F. S. (2022) ).

Teori ini juga menekankan peran media massa dalam memperluas atau mempersempit kesenjangan informasi. Media massa yang terkonsentrasi di tangan segelintir elit dapat memperkuat kesenjangan informasi, sementara media massa yang beragam dan terjangkau dapat membantu mengurangi kesenjangan tersebut. Akses media yang merata sangat penting. Selain itu, Teori Kesenjangan Informasi juga mempertimbangkan peran institusi

---

<sup>3</sup> Yonatan, D., & Tanggur, F. S. (2022). Disparitas media pembelajaran pada era digitalisasi pendidikan di wilayah perbatasan RI-RDTL (Refleksi pembelajaran online daerah perbatasan). *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)*, 5(2), 1–28. [eISSN: 2621-1467]

sosial dan politik. Institusi yang demokratis dan transparan akan lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan informasi. Sebaliknya, institusi yang otoriter dan tidak transparan cenderung memperkuat kesenjangan informasi. Transparansi dan akses publik sangat penting.

Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya kualitas informasi. Informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan. Informasi yang salah atau menyesatkan justru dapat memperburuk situasi. Kualitas informasi menentukan efektivitasnya. Aspek lain yang penting adalah kemampuan individu untuk menggunakan informasi untuk meningkatkan kehidupan mereka. Informasi saja tidak cukup; individu juga perlu memiliki keterampilan dan sumber daya untuk memanfaatkan informasi tersebut. Keterampilan dan sumber daya pendukung sangat diperlukan.

Teori Kesenjangan Informasi juga mengakui adanya faktor geografis dan ekonomi. Individu yang tinggal di daerah terpencil atau miskin cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap informasi dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan atau kaya. Faktor geografis dan ekonomi memperkuat kesenjangan. Lebih lanjut, teori ini menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan digital dapat memperkuat kesenjangan informasi. Akses terbatas pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti internet dan perangkat seluler, dapat membatasi kemampuan individu dan kelompok untuk mengakses informasi penting. Kesenjangan digital memperburuk masalah.

Perlu diingat bahwa Teori Kesenjangan Informasi bukanlah suatu teori yang statis. Dinamika sosial, teknologi, dan kebijakan dapat memengaruhi tingkat kesenjangan informasi. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan akses informasi bagi sebagian orang, tetapi juga dapat memperlebar kesenjangan bagi mereka yang tertinggal. Dinamika sosial terus berubah. Teori Kesenjangan Informasi menyoroti pentingnya akses informasi yang merata sebagai prasyarat untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif. Mengatasi kesenjangan informasi membutuhkan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan infrastruktur, literasi digital, dan kualitas informasi, serta penguatan institusi sosial dan politik yang demokratis dan transparan. Akses informasi yang merata merupakan kunci kesetaraan.

## **2. Dampak Keterbatasan Akses Informasi terhadap Indikator Pembangunan Manusia (Human Development Index - HDI)**

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index - HDI) merupakan ukuran komposit yang menggabungkan tiga dimensi pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Keterbatasan akses informasi memiliki dampak yang signifikan terhadap ketiga dimensi ini, sehingga secara langsung memengaruhi nilai HDI suatu wilayah atau negara. Akses informasi yang terbatas menghambat pembangunan manusia.

### **a) Kesehatan**

Akses informasi yang terbatas berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Kurangnya informasi mengenai penyakit menular, pencegahan penyakit, dan layanan kesehatan yang tersedia dapat menyebabkan peningkatan angka kesakitan dan kematian. Informasi mengenai kesehatan reproduksi, gizi, dan kebersihan juga sangat penting, namun seringkali kurang diakses oleh masyarakat yang terpencil atau kurang informasi. Akses informasi kesehatan yang buruk meningkatkan angka kematian.<sup>4</sup> (Tatara, B. A., & Retnaningsih, W. S. (2021) ).

### **b) Pendidikan**

Keterbatasan akses informasi secara signifikan memengaruhi kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Guru dan siswa mungkin kesulitan mendapatkan materi pembelajaran yang dibutuhkan, seperti kurikulum terbaru, metode pembelajaran inovatif, dan sumber belajar online. Kurangnya informasi juga dapat membatasi kesempatan pendidikan bagi anak perempuan dan kelompok-kelompok marjinal. Akses informasi pendidikan yang terbatas menurunkan kualitas pendidikan.

### **c) Standar Hidup**

Akses informasi yang terbatas berdampak pada standar hidup masyarakat. Kurangnya informasi mengenai peluang ekonomi, teknologi baru, dan program pemerintah dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup. Petani, misalnya, mungkin tidak mengetahui harga

---

<sup>4</sup> Tatara, B. A., & Retnaningsih, W. S. (2021). Upaya mitigasi potensi ancaman ungoverned territory pulau Sebatik. *Jurnal Poros Politik*, 59(1), 1–14. [ISSN: 2528-0953]

pasar terkini atau teknologi pertanian modern, sehingga produktivitas mereka rendah. Informasi pasar yang terbatas menyebabkan kemiskinan.

Keterbatasan akses informasi juga dapat menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Kurangnya informasi mengenai lowongan pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, dan proses perekrutan dapat membatasi peluang kerja bagi individu dan keluarga. Akses informasi pekerjaan yang terbatas meningkatkan pengangguran. Lebih lanjut, keterbatasan akses informasi dapat mempengaruhi partisipasi politik. Kurangnya informasi mengenai kebijakan pemerintah, hak-hak warga negara, dan proses demokrasi dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan mengurangi partisipasi politik. Akses informasi politik yang terbatas menurunkan partisipasi warga. Akses informasi yang terbatas juga dapat menyebabkan kerentanan terhadap eksploitasi. Individu yang kurang informasi mungkin rentan terhadap penipuan, eksploitasi tenaga kerja, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Informasi perlindungan hukum yang terbatas meningkatkan kerentanan.

Selain itu, keterbatasan akses informasi juga dapat menghambat inovasi dan kemajuan teknologi. Kurangnya akses terhadap informasi teknologi dan informasi ilmiah dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan produktivitas. Inovasi membutuhkan informasi terkini. Dampak keterbatasan akses informasi terhadap HDI juga bervariasi tergantung pada konteks geografis, sosial, dan ekonomi. Wilayah terpencil dan miskin cenderung lebih terdampak daripada wilayah yang lebih maju. Faktor ini memperkuat kesenjangan pembangunan. Untuk meningkatkan HDI, sangat penting untuk mengatasi kesenjangan akses informasi. Strategi yang efektif termasuk peningkatan infrastruktur telekomunikasi, program literasi digital, dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh masyarakat. Peningkatan akses informasi merupakan kunci pembangunan manusia.

### **3. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Akses Informasi di Daerah Perbatasan**

Meningkatkan akses informasi di daerah perbatasan membutuhkan strategi dan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Tantangan geografis, ekonomi, dan sosial yang unik di daerah perbatasan menuntut pendekatan yang spesifik dan terukur. Strategi

yang efektif harus mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari infrastruktur hingga kapasitas masyarakat.<sup>5</sup> (Saiman. (2017) ).

**a) Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi**

Salah satu langkah paling penting adalah meningkatkan infrastruktur telekomunikasi. Ini meliputi perluasan jaringan internet broadband, penerapan teknologi seluler yang andal, dan pengembangan infrastruktur pendukung, seperti menara pemancar sinyal. Akses internet yang memadai sangat penting.

**b) Program Literasi Digital**

Meningkatkan literasi digital masyarakat sangat krusial. Program pelatihan dan pendidikan harus dirancang untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengakses, memproses, dan memanfaatkan informasi digital. Program literasi digital harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

**c) Pembuatan Konten Informasi Lokal**

Konten informasi yang relevan dan mudah dipahami dalam bahasa lokal harus disediakan. Informasi ini harus mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Pentingnya konten lokal yang relevan tidak dapat diabaikan.

**Penguatan Peran Pemerintah Daerah:** Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam memfasilitasi akses informasi. Ini meliputi penyediaan sumber daya, koordinasi antar instansi, dan pengawasan implementasi program. Pemerintah daerah harus menjadi motor penggerak. **Kerjasama Antar Instansi:** Kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta sangat penting. Kerjasama ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program peningkatan akses informasi. Kerja sama antar pihak meningkatkan efektivitas program. **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):** Pemanfaatan TIK, seperti aplikasi mobile, platform online, dan media sosial, dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas penyampaian informasi. Teknologi

---

<sup>5</sup> Saiman. (2017). Kepentingan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. *Jurnal Sospol*, 3(1), 142–161.

digital harus dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan Kualitas Informasi: Informasi yang disebarluaskan harus akurat, relevan, dan mudah dipahami. Masyarakat juga harus diberikan pelatihan untuk mengenali dan menghindari informasi yang menyesatkan. Kualitas informasi sangat penting.<sup>6</sup> (Hikam, M. A. S., & Praditya, Y. (2015) ).

### **1) Pemantauan dan Evaluasi**

Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program peningkatan akses informasi berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi memastikan efektivitas program.

### **2) Keterlibatan Masyarakat**

Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan implementasi program peningkatan akses informasi. Partisipasi masyarakat akan meningkatkan keberhasilan program.

### **3) Pendanaan yang Cukup**

Program peningkatan akses informasi membutuhkan pendanaan yang cukup dan berkelanjutan. Sumber pendanaan dapat berasal dari pemerintah, lembaga donor, dan sektor swasta. Pendanaan yang memadai memastikan keberlanjutan program.

Dengan menerapkan strategi dan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi ini, akses informasi di daerah perbatasan dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, dan politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan yang terintegrasi merupakan kunci keberhasilan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin

---

<sup>6</sup> Hikam, M. A. S., & Praditya, Y. (2015). Globalisasi dan pemetaan kekuatan strategis pertahanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman transnasional: Berdasarkan analisis model element of national power: (Political, Military, Economic, Social, Infrastructure, and Information/PMESII). *Jurnal Pertahanan*, 5(2), 53–69.

menganalisis pengaruh ketertinggalan akses informasi terhadap pembangunan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, serta keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan penelitian lapangan yang komprehensif. Pendekatan studi literatur memungkinkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur di berbagai basis data ilmiah, seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan lainnya. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "akses informasi," "daerah perbatasan," "pembangunan daerah," "Indonesia-Malaysia," dan kombinasi kata kunci lainnya yang relevan. Pencarian literatur juga dilakukan di perpustakaan, baik secara fisik maupun digital, untuk menemukan literatur yang relevan, termasuk laporan pemerintah, jurnal, buku, dan artikel. Strategi pencarian yang komprehensif memastikan data yang komprehensif.

Proses analisis data dilakukan secara bertahap. Tahap pertama meliputi penelaahan literatur untuk memahami kerangka teoritis dan konseptual yang relevan. Tahap kedua melibatkan identifikasi tema dan subtema yang muncul dari literatur. Tahap ketiga meliputi pengelompokan dan interpretasi data untuk menghasilkan temuan penelitian. Proses analisis yang bertahap meningkatkan akurasi. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan naratif, menjelaskan temuan utama dari studi literatur dan interpretasi peneliti terhadap temuan tersebut. Presentasi hasil penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Kesimpulan penelitian ditarik berdasarkan analisis temuan studi literatur dan menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh ketertinggalan akses informasi terhadap pembangunan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, berdasarkan pendekatan studi literatur.

### Hasil Penelitian:

Analisis literatur menunjukkan keterkaitan yang kuat antara keterbatasan akses informasi dan berbagai aspek pembangunan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Studi menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi berdampak signifikan terhadap:

#### a) Indikator Pembangunan Manusia (IPM)

Keterbatasan akses informasi berkorelasi negatif dengan IPM. Kurangnya informasi mengenai kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi menyebabkan rendahnya angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita di daerah perbatasan.<sup>7</sup> (Sy afeif, E. S. (2015) ).

**b) Pengembangan Ekonomi**

Keterbatasan akses informasi menghambat pengembangan ekonomi lokal. Kurangnya informasi pasar, teknologi, dan program pemerintah menyebabkan rendahnya produktivitas, daya saing, dan pendapatan masyarakat. UMKM di daerah perbatasan, misalnya, seringkali kekurangan informasi mengenai akses pembiayaan dan pemasaran.

**c) Partisipasi Masyarakat**

Keterbatasan akses informasi mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kurangnya informasi mengenai program pemerintah dan kebijakan publik menyebabkan masyarakat kurang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan.

**d) Kualitas Sumber Daya Manusia**

Keterbatasan akses informasi berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia. Kurangnya akses terhadap informasi pendidikan dan pelatihan menyebabkan rendahnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat.

**e) Kesiapsiagaan Bencana**

Keterbatasan akses informasi menyebabkan rendahnya kesiapsiagaan bencana. Kurangnya informasi mengenai peringatan dini bencana, evakuasi, dan penanganan pasca bencana dapat meningkatkan risiko kerugian jiwa dan harta benda.

**Pembahasan:**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketertinggalan akses informasi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan faktor penghambat pembangunan yang signifikan. Keterbatasan

---

<sup>7</sup> Sy afeif, E. S. (2015). PEMBERDAYAAN PEMUDA DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KAWASAN PERBATASAN. Makalah yang dipresentasikan pada Kongres Pancasila ke-VII di Balairung UGM Yogyakarta, 1 Juni 2015.

akses informasi menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan. Kurangnya informasi menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang selanjutnya menghambat pengembangan ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kondisi ini diperparah oleh infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai dan rendahnya literasi digital masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa keterbatasan akses informasi tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan faktor-faktor lain seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Kondisi geografis yang terisolir juga memperparah permasalahan akses informasi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Peningkatan infrastruktur telekomunikasi, program literasi digital, penyediaan konten informasi lokal yang relevan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk mengatasi keterbatasan akses informasi dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di daerah perbatasan. Strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan diperlukan. Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan di daerah perbatasan. Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan faktor akses informasi dan mendorong peningkatan literasi digital, aksesibilitas teknologi, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam dampak spesifik keterbatasan akses informasi terhadap berbagai sektor pembangunan di daerah perbatasan, serta mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi yang telah dan akan dilakukan. Penelitian lebih lanjut akan semakin memperkuat temuan.<sup>8</sup> (Sudiar, S. (2015) ).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Keterbatasan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk IPM, pengembangan ekonomi, partisipasi masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan kesiapsiagaan bencana. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan, diperparah oleh faktor-faktor lain seperti

---

<sup>8</sup> Sudiar, S. (2015). Pembangunan wilayah perbatasan negara: Gambaran tentang strategi pengelolaan kawasan perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform*, 3(4), 490–500.

kemiskinan, ketidaksetaraan, lemahnya tata kelola pemerintahan, dan kondisi geografis yang terisolir. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses informasi dan literasi digital menjadi sangat penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di daerah perbatasan.<sup>9</sup> (Budianta, A. (2010) ).

## SARAN

- a) Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur telekomunikasi di daerah perbatasan, termasuk perluasan jaringan internet broadband dan peningkatan jangkauan sinyal seluler. Akses internet yang memadai merupakan prasyarat utama.
- b) Program literasi digital yang komprehensif perlu dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi digital. Program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.
- c) Konten informasi yang relevan, akurat, dan mudah dipahami dalam bahasa lokal perlu diproduksi dan disebarluaskan secara efektif. Konten ini harus mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pertanian, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan.
- d) Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam memfasilitasi akses informasi, termasuk koordinasi antar instansi, pengawasan program, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program. Pemerintah daerah harus menjadi motor penggerak.
- e) Kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program peningkatan akses informasi. Kerjasama akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

## DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>9</sup> Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. *Jurnal SMARTek*, 8(1), 72–82.

- Maria Viviana Ero Payon, Maria Fatima Kartika Mao Foju, Yohanes Arman, Dampak Perubahan Titik Batas Di Pulau Sebatik Perbatasan Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Prinsip Uti Prossidentis, *Student Scientific Creativity Journal* Vol. 1, No.5 September 2023, Hal 3.
- Purnamasari, W., Kara, M. H., Sabri, M., Amiruddin, A. R., & K, T. (2016). Perkembangan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara Indonesia Malaysia di Sambas. *Jurnal Diskursus Islam*, 4(2), 217–247.
- Yonatan, D., & Tanggur, F. S. (2022). Disparitas media pembelajaran pada era digitalisasi pendidikan di wilayah perbatasan RI-RDTL (Refleksi pembelajaran online daerah perbatasan). *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)*, 5(2), 1–28. [eISSN: 2621-1467].
- Tatara, B. A., & Retnaningsih, W. S. (2021). Upaya mitigasi potensi ancaman ungoverned territory pulau Sebatik. *Jurnal Poros Politik*, 59(1), 1–14. [ISSN: 2528-0953].
- Saiman. (2017). Kepentingan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. *Jurnal Sospol*, 3(1), 142–161.
- Hikam, M. A. S., & Praditya, Y. (2015). Globalisasi dan pemetaan kekuatan strategis pertahanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman transnasional: Berdasarkan analisis model element of national power: (Political, Military, Economic, Social, Infrastructure, and Information/PMESII). *Jurnal Pertahanan*, 5(2), 53–69.
- Sy afeif, E. S. (2015). PEMBERDAYAAN PEMUDA DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KAWASAN PERBATASAN. Makalah yang dipresentasikan pada Kongres Pancasila ke-VII di Balairung UGM Yogyakarta, 1 Juni 2015.
- Sudiar, S. (2015). Pembangunan wilayah perbatasan negara: Gambaran tentang strategi pengelolaan kawasan perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform*, 3(4), 490–500.
- Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. *Jurnal SMARTek*, 8(1), 72–82.